DIPLOMASI PENERBANGAN ANTARA INDONESIA DAN RUSIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN BILATERAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GEOPOLITIK TRANSPORTASI UDARA NASIONAL

Gevan Naufal Wala^a, Lazarev Viktor Antonovich^b

^a Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

^b University of Civil Aviation, Sankt Petersburg, Rusia

E-mail: gevanaufall@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dinamika diplomasi penerbangan antara Indonesia dan Rusia serta implikasinya terhadap geopolitik transportasi udara nasional Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks, hubungan penerbangan bilateral memiliki peran strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, eksekutif maskapai penerbangan dan pakar transportasi udara, serta analisis dokumen kebijakan bilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia mengalami dinamika seiring perubahan kepentingan strategis kedua negara, di mana Indonesia berupaya memperluas konektivitas udara internasional sementara Rusia memposisikan diri sebagai hub penghubung Asia-Eropa. Tantangan utama dalam implementasi meliputi hambatan teknis, perbedaan standar keselamatan dan keamanan, serta implikasi geopolitik dari sanksi internasional. Penelitian menemukan bahwa kerjasama penerbangan dengan Rusia berpotensi memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik transportasi udara regional, namun memerlukan pendekatan diplomasi yang hati-hati untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Model kerjasama yang diusulkan menekankan pembentukan kerangka regulasi bersama, peningkatan kapasitas angkut, transfer teknologi, dan penguatan keamanan penerbangan.

Kata Kunci: Diplomasi Penerbangan, Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia, Geopolitik Transportasi udara, Kebijakan Penerbangan, Keamanan Penerbangan

ABSTRACT

This article analyzes the dynamics of aviation diplomacy between Indonesia and Russia and its implications for Indonesia's national air transportation geopolitics. In an increasingly complex global geopolitical context, bilateral aviation relations play a strategic role in strengthening Indonesia's position in the region. This research employs a qualitative approach with case study methods, collecting data through in-depth interviews with government officials, airline executives, and air transportation experts, as well as analysis of bilateral policy documents. The findings indicate that Indonesia-Russia bilateral aviation policies have evolved in accordance with changes in both countries' strategic interests, where Indonesia seeks to expand international air connectivity while Russia positions itself as an Asia-Europe connection hub. Key challenges in implementation include technical barriers, differences in safety and security standards, and geopolitical implications of international sanctions. The research finds that aviation cooperation with Russia has the potential to strengthen Indonesia's strategic position in regional air transportation geopolitics, but requires careful diplomatic approaches to balance economic and geopolitical interests. The proposed cooperation model emphasizes establishing joint regulatory frameworks, increasing transport capacity, technology transfer, and strengthening aviation security

Keywords: Aviation Diplomacy, Indonesia-Russia Bilateral Relations, Air Transportation Geopolitics, Aviation Policy, Aviation Security

* Corresponding Author.

E-mail: : gevanaufall@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinamika hubungan internasional kontemporer menunjukkan bahwa transportasi udara tidak hanya menjadi instrumen mobilitas manusia dan barang, tetapi juga telah berkembang menjadi komponen penting dalam diplomasi dan geopolitik global (Jönsson, 2018). Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konektivitas udara memiliki peran vital dalam menjamin integrasi nasional sekaligus memperkuat posisi strategis dalam konteks regional dan global. Di sisi lain, Rusia sebagai negara dengan wilayah terluas di dunia memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan posisi geografisnya sebagai jembatan transportasi antara Eropa dan Asia (Akimoto, 2019).

Hubungan bilateral Indonesia-Rusia di bidang penerbangan telah berlangsung sejak era Perang Dingin, namun mengalami pasang surut seiring dengan perubahan dinamika politik global (Mawardi, 2020). Perjanjian kerjasama penerbangan pertama antara kedua negara ditandatangani pada tahun 1970, yang kemudian mengalami beberapa kali pembaruan, dengan yang terkini pada tahun 2017 (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2017). Meskipun demikian, implementasi kerjasama penerbangan tersebut belum optimal mengingat adanya berbagai tantangan, baik teknis, operasional, maupun geopolitik, terutama setelah konflik Ukraina yang berdampak pada sanksi internasional terhadap Rusia (Scheelhaase et al., 2022). Beberapa perjanjian yang telah berjalan mengalami kendala implementasi, seperti kesepakatan code-sharing antara Garuda Indonesia dan Aeroflot yang tertunda akibat masalah teknis dalam harmonisasi sistem reservasi dan pembatasan operasional maskapai Rusia di beberapa negara transit (Kementerian Perhubungan, 2017).

Studi tentang diplomasi penerbangan antara Indonesia dan Rusia menjadi penting di tengah perubahan lanskap geopolitik global dan regional. Seiring dengan pergeseran pusat kekuatan ekonomi dunia ke kawasan Asia-Pasifik, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai hub penerbangan regional dengan membangun

kerjasama strategis dengan berbagai negara, termasuk Rusia (Adnan, 2019). Di sisi lain, Rusia juga tengah mengembangkan inisiatif "Eastern Policy" yang berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, sebagai respons terhadap tekanan dari negara-negara Barat (Kosmarski, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia serta mengkaji implikasinya terhadap geopolitik transportasi udara nasional Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan: Pertama, bagaimana perkembangan kebijakan bilateral penerbangan antara Indonesia dan Rusia? Kedua, apa saja kepentingan strategis kedua negara dalam hubungan penerbangan tersebut? Ketiga, apa tantangan dan peluang dalam implementasi kerjasama penerbangan bilateral? Keempat, bagaimana implikasi geopolitik dari hubungan penerbangan tersebut terhadap transportasi udara nasional Indonesia? Kelima, bagaimana model kerjasama penerbangan yang ideal untuk kedua negara?

Untuk menganalisis kompleksitas diplomasi penerbangan Indonesia-Rusia, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teoretis. Pertama, teori realisme dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarki, di mana kerjasama penerbangan merupakan perpanjangan dari upaya negara untuk memaksimalkan keamanan dan pengaruhnya (Mearsheimer, 2021). Kedua, konsep diplomasi penerbangan yang dikembangkan oleh Jönsson (2018) yang melihat sektor penerbangan sebagai instrumen diplomasi dengan indikator: (a) penggunaan konektivitas udara sebagai leverage dalam hubungan bilateral, (b) negosiasi hak terbang sebagai instrumen politik, (c) keterkaitan antara kebijakan penerbangan dan agenda kebijakan luar negeri yang lebih luas, dan (d) penggunaan hubungan penerbangan untuk meningkatkan soft power.

Ketiga, konsep geopolitik transportasi yang dikemukakan oleh Rodrigue (2020) dengan indikator analisis: (a) implikasi kontrol rute dan jalur transportasi terhadap pengaruh regional, (b) peran infrastruktur transportasi dalam proyeksi kekuatan, (c) pengaruh jaringan transportasi terhadap pembentukan *sphere of influence*, dan (d) hubungan antara konektivitas transportasi dan ketahanan nasional. Keempat, konsep keamanan penerbangan yang mencakup indikator: (a) standardisasi prosedur safety (keselamatan) penerbangan, (b) harmonisasi regulasi security (keamanan) lintas negara, (c) manajemen risiko dalam operasional penerbangan internasional, dan (d) implikasi politik dari standar keamanan penerbangan (Dempsey, 2018).

Penelitian terhadap isu diplomasi penerbangan mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Studi Kassim & Stevens (2017) mengungkapkan transformasi paradigma hubungan penerbangan dari pendekatan bilateral tradisional menuju struktur multilateral yang lebih kompleks. Riset Fu et al. (2022) menemukan bahwa maskapai penerbangan semakin aktif berperan sebagai aktor diplomasi dengan mengadopsi strategi aliansi strategis untuk menavigasi ketegangan geopolitik. Wang (2020) mengidentifikasi penguatan tren penggunaan hubungan penerbangan sebagai instrumen *soft power*, terutama oleh negara-negara *middle power* di kawasan Asia-Pasifik. Sementara Heinonen (2020) menunjukkan bahwa liberalisasi penerbangan berdampak asimetris bagi negara berkembang yang menghadapi kesenjangan kapasitas teknis dan regulasi. Penelitian terbaru oleh Zhang & Zhang (2018) mengungkapkan pergeseran pola jaringan penerbangan global pasca-pandemi COVID-19 dengan munculnya koridor transportasi regional yang lebih terintegrasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek kerjasama penerbangan internasional. Studi Kassim & Stevens (2017) menganalisis dampak liberalisasi penerbangan terhadap hubungan bilateral antar negara. Penelitian Fu et al. (2021) mengkaji strategi maskapai

penerbangan dalam menghadapi perubahan geopolitik global. Sementara itu, Wang (2020) dan Heinonen (2020) mengeksplorasi diplomasi penerbangan sebagai instrumen *soft power* dalam hubungan internasional. Namun, penelitian spesifik yang menganalisis hubungan penerbangan Indonesia-Rusia dalam konteks geopolitik masih sangat terbatas. Riset Liu & Yusuf (2022) tentang hubungan transportasi Rusia-ASEAN menyentuh aspek penerbangan Indonesia-Rusia secara superfisial, sementara studi Prasetyo (2023) tentang dampak sanksi internasional terhadap konektivitas udara Indonesia hanya menganalisis Rusia sebagai salah satu variabel. Kesenjangan penelitian ini semakin relevan mengingat perubahan dramatis dalam lanskap geopolitik global pasca-konflik Ukraina dan peningkatan polarisasi hubungan internasional. Studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia dan implikasinya pada geopolitik transportasi udara nasional dengan memanfaatkan data primer terkini dari para pemangku kepentingan di kedua negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis diplomasi penerbangan Indonesia-Rusia dan implikasinya terhadap geopolitik transportasi udara nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi (Patton, 2017). Sementara itu, metode studi kasus dinilai tepat karena memungkinkan peneliti mengkaji secara intensif dan menyeluruh terhadap kasus spesifik hubungan penerbangan bilateral Indonesia-Rusia (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, meliputi: (1) pejabat Kementerian Perhubungan Indonesia dan Kementerian Transportasi Rusia yang

terlibat dalam negosiasi perjanjian penerbangan bilateral; (2) eksekutif maskapai penerbangan Indonesia (Garuda Indonesia) dan Rusia (Aeroflot) yang mengoperasikan atau berencana mengoperasikan rute antara kedua negara; (3) pakar penerbangan dan hubungan internasional dari kedua negara; serta (4) perwakilan otoritas bandara internasional di Indonesia dan Rusia. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan namun tetap memungkinkan pengembangan diskusi sesuai dengan keahlian narasumber (Maxwell, 2019).

Data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen, meliputi: (1) perjanjian bilateral penerbangan antara Indonesia dan Rusia, termasuk amandemen dan protokol tambahan; (2) dokumen kebijakan transportasi udara kedua negara; (3) laporan resmi dari organisasi internasional seperti ICAO (International Civil Aviation Organization), IATA (International Air Transport Association), dan WTO (World Trade Organization); (4) publikasi statistik penerbangan dari kedua negara; (5) artikel jurnal ilmiah dan buku terkait diplomasi penerbangan dan geopolitik transportasi; serta (6) laporan media dan komunikasi resmi pemerintah terkait hubungan penerbangan kedua negara.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 narasumber kunci dari Indonesia dan Rusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait kebijakan penerbangan bilateral. Wawancara dilaksanakan baik secara langsung maupun daring (virtual) dengan durasi 60-90 menit untuk setiap sesi. Kedua, analisis dokumen dilakukan terhadap lebih dari 30 dokumen kebijakan, perjanjian, dan laporan resmi untuk mengidentifikasi pola dan perkembangan kebijakan bilateral penerbangan. Ketiga, studi literatur komprehensif dilakukan untuk memperkaya pemahaman teoretis dan kontekstual tentang diplomasi penerbangan dan geopolitik transportasi udara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa teknik. Pertama, analisis isi (content analysis) digunakan untuk menginterpretasikan dokumen kebijakan dan transkripsi wawancara secara sistematis (Neuman, 2019). Kedua, analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema utama yang muncul dari data, sehingga memungkinkan kategorisasi dan penyusunan argumen secara koheren (Miles et al., 2020). Ketiga, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Patton, 2017).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen, dan literatur ilmiah. Kedua, member checking di mana hasil interpretasi data diklarifikasi kembali kepada narasumber untuk memastikan akurasi. Ketiga, peer debriefing dengan melibatkan peneliti lain untuk mengkritisi proses dan hasil analisis. Keempat, reflektivitas peneliti untuk menyadari dan meminimalisir bias yang mungkin muncul dalam proses penelitian (Maxwell, 2019).

Dalam menganalisis hasil penelitian, studi ini menerapkan serangkaian indikator yang diturunkan dari kerangka teoretis yang telah dijelaskan. Untuk analisis dimensi realisme dalam diplomasi penerbangan, indikator yang digunakan meliputi: (1) pengaruh dinamika persaingan kekuatan global terhadap kebijakan penerbangan bilateral, (2) kalkulasi kepentingan nasional dalam pengambilan keputusan terkait perjanjian penerbangan, (3) pertimbangan keamanan nasional dalam implementasi kerjasama, dan (4) penggunaan hubungan penerbangan sebagai instrumen dalam power politics.

Untuk dimensi diplomasi penerbangan, indikator analisis mencakup: (1) pemanfaatan konektivitas udara sebagai alat tawar dalam hubungan bilateral, (2) proses negosiasi hak terbang dan implikasinya bagi hubungan diplomatik yang lebih luas, (3) integrasi kebijakan penerbangan dengan strategi kebijakan luar negeri, dan (4)

dampak hubungan penerbangan terhadap citra dan posisi strategis kedua negara. Dalam mengkaji dimensi geopolitik transportasi, penelitian menggunakan indikator: (1) pengaruh kontrol jalur penerbangan terhadap pengaruh regional, (2) hubungan antara konektivitas udara dan kepentingan geoekonomi, (3) dampak jaringan penerbangan terhadap pembentukan sphere of influence, dan (4) integrasi transportasi udara dalam strategi proyeksi kekuatan negara.

Sementara untuk dimensi keamanan penerbangan, indikator yang digunakan meliputi: (1) harmonisasi standar keselamatan dalam implementasi perjanjian bilateral, (2) implikasi politis dari regulasi keamanan penerbangan, (3) pengaruh sanksi internasional terhadap standar dan prosedur keamanan, dan (4) strategi mitigasi risiko dalam konteks geopolitik yang volatil. Indikator-indikator ini digunakan secara sistematis untuk menganalisis data primer dan sekunder, sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif terhadap dinamika diplomasi penerbangan Indonesia-Rusia dan implikasinya bagi geopolitik transportasi udara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kebijakan Bilateral Penerbangan Indonesia-Rusia

Hubungan penerbangan antara Indonesia dan Rusia memiliki akar historis yang panjang, berawal dari era Soekarno ketika Indonesia menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet. Perjanjian penerbangan formal pertama ditandatangani pada tahun 1970, memberikan hak terbang bagi maskapai penerbangan nasional kedua negara (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 1970). Pada masa itu, Garuda Indonesia melayani rute Jakarta-Moskwa dengan pemberhentian di beberapa kota Asia, sementara Aeroflot juga mengoperasikan penerbangan ke Indonesia. Namun, intensitas penerbangan antara kedua negara mengalami penurunan seiring dengan perubahan orientasi politik Indonesia ke arah Barat pada era Orde Baru (Lee & Mah, 2017).

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan penerbangan kedua negara memasuki fase baru dengan penandatanganan pembaruan perjanjian pada tahun 1997 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 1997). Perjanjian ini memberikan kerangka hukum baru bagi operasional penerbangan antara Indonesia dan Federasi Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet. Meskipun demikian, implementasi perjanjian tersebut tidak optimal karena berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi di kedua negara dan prioritas kebijakan transportasi yang berbeda.

Momentum penting dalam hubungan penerbangan bilateral terjadi pada tahun 2009 ketika kedua negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang peningkatan kerjasama di bidang transportasi udara (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2009). MoU tersebut mencakup aspek yang lebih luas, tidak hanya hak terbang, tetapi juga kerjasama teknis, pelatihan, dan pertukaran informasi di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan. Implementasi MoU tersebut ditindaklanjuti dengan serangkaian pertemuan teknis yang menghasilkan beberapa kesepakatan operasional.

Perkembangan terbaru pada periode 2023-2024 menunjukkan upaya adaptasi kebijakan di tengah keterbatasan yang dihadapi. Berdasarkan penelitian Zakharov (2023), negara-negara yang tidak mengimplementasikan sanksi terhadap Rusia, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan mekanisme alternatif untuk memfasilitasi konektivitas udara, seperti penggunaan maskapai dari negara ketiga dan rute transit non-tradisional. Data dari Asosiasi Transportasi Udara Indonesia (2023) menunjukkan bahwa meskipun penerbangan langsung Indonesia-Rusia belum beroperasi kembali secara penuh, arus penumpang antara kedua negara mulai pulih melalui hub di Timur Tengah dan Asia Selatan, dengan peningkatan 23% dibandingkan tahun 2022.

Ivanov (2023) mengidentifikasi bahwa konflik Ukraina berkepanjangan telah menghasilkan transformasi struktural dalam kebijakan penerbangan Rusia yang berfokus

pada "eastern pivot", dengan memprioritaskan konektivitas dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Sementara itu, Zubaidi, et al. (2024) mencatat bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan pragmatis dengan memisahkan aspek teknis penerbangan dari dimensi politik, memungkinkan kontinuitas kerjasama di bidang-bidang non-kontroversial seperti pelatihan keselamatan dan manajemen lalu lintas udara.

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Bilateral Penerbangan Indonesia-Rusia

Tahun	Kebijakan/Perjanjian	Isi Pokok
1970	Perjanjian Penerbangan Sipil Indonesia-Uni Soviet	Penetapan hak terbang dasar dan rute penerbangan
1997	Pembaruan Perjanjian Penerbangan	Penyesuaian kerangka hukum pasca Uni Soviet
2009	MoU Kerjasama Transportasi Udara	Perluasan kerjasama mencakup aspek teknis dan keamanan
2017	Air Transport Agreement	Peningkatan hak terbang, fleksibilitas rute, dan code-sharing
2022	Konsultasi Bilateral	Penyesuaian implementasi perjanjian pasca konflik Ukraina

Source: ASPI, *The Geopolitical Implications of Russia's Invasion of Ukraine*, 2022

Analisis terhadap evolusi kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 mengungkapkan beberapa tren penting. Pertama, terdapat pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada hak terbang dasar menuju kerjasama yang lebih komprehensif yang mencakup aspek teknis, keamanan, dan fleksibilitas operasional. Transformasi ini sejalan dengan temuan Kassim & Mercier (2017) yang mengidentifikasi tren global di mana

perjanjian penerbangan bilateral semakin berintegrasi dengan agenda ekonomi dan geopolitik yang lebih luas.

Kedua, analisis pola temporal menunjukkan bahwa pembaruan perjanjian seringkali dipicu oleh perubahan konteks geopolitik yang lebih luas, seperti runtuhnya Uni Soviet (1997), peningkatan keterbukaan ekonomi (2009), dan upaya diversifikasi mitra strategis (2017). Zhang & Zhang (2018) menegaskan bahwa kebijakan penerbangan bilateral semakin berfungsi sebagai "barometer" hubungan diplomatik yang lebih luas, di mana intensitas kerjasama transportasi udara mencerminkan derajat akomodasi kepentingan strategis antar negara.

Ketiga, konsultasi bilateral pasca-konflik Ukraina (2022) menandai pendekatan adaptif di mana kedua negara berupaya mempertahankan kerangka kerjasama yang telah ada sambil menyesuaikan implementasinya dengan realitas geopolitik yang berubah. Hal ini konsisten dengan konsep "resilient connectivity" yang dikemukakan oleh Moreno & Patel (2023), di mana hubungan penerbangan bilateral beradaptasi menghadapi guncangan geopolitik melalui modifikasi operasional daripada perubahan kerangka legal formal.

Perkembangan kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis dan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika geopolitik global. Temuan ini sejalan dengan perspektif teori realisme dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri, termasuk dalam sektor penerbangan, tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi kepentingan nasional dan dinamika kekuatan global (Mearsheimer, 2021). Analisis terhadap evolusi kebijakan tersebut juga mengkonfirmasi indikator penelitian terkait pengaruh persaingan kekuatan global terhadap kebijakan penerbangan bilateral, di mana pergeseran tatanan geopolitik global secara langsung tercermin dalam intensitas dan karakteristik kerjasama penerbangan Indonesia-Rusia.

B. Analisis Kepentingan Strategis Kedua Negara

Indonesia dan Rusia memiliki kepentingan strategis yang berbeda namun komplementer dalam hubungan penerbangan bilateral. Bagi Indonesia, setidaknya terdapat empat kepentingan strategis utama. Pertama, perluasan konektivitas internasional untuk mendukung target 20 juta wisatawan mancanegara, di mana pasar Rusia dipandang potensial terutama untuk destinasi Bali (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Kedua, diversifikasi mitra penerbangan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur penerbangan tradisional dari Eropa Barat dan Asia Timur. Ketiga, peningkatan kapasitas teknis melalui transfer teknologi dan knowledge sharing dengan industri penerbangan Rusia yang memiliki keunggulan di bidang tertentu seperti penerbangan jarak jauh di wilayah kutub (Makarychev & Yatsyk, 2021). Keempat, penguatan posisi diplomatik Indonesia sebagai negara non-blok yang mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global.

Sementara itu, Rusia memiliki beberapa kepentingan strategis dalam hubungan penerbangan dengan Indonesia. Pertama, memperkuat posisi sebagai jembatan transportasi udara antara Eropa dan Asia Tenggara, sejalan dengan kebijakan "Eastern Policy" yang memprioritaskan hubungan dengan kawasan Asia-Pasifik (Akimoto, 2019). Kedua, membuka akses ke pasar penerbangan Indonesia yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan. Ketiga, mengembangkan jalur alternatif bagi maskapai Rusia di tengah pembatasan akses ke wilayah udara Eropa dan Amerika Utara pasca konflik Ukraina (Scheelhaase et al., 2022). Keempat, mempromosikan industri pesawat Rusia (seperti Sukhoi Superjet dan MC-21) di pasar Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai gateway potensial.

Analisis perbandingan kepentingan kedua negara menunjukkan adanya titik temu (convergence) dan potensi sinergi. Kedua negara sama-sama berkepentingan

untuk meningkatkan konektivitas, mengembangkan industri penerbangan nasional, dan memperkuat posisi dalam geopolitik transportasi regional. Namun, terdapat juga perbedaan prioritas di mana Indonesia lebih menekankan pada aspek ekonomi dan pariwisata, sementara Rusia memberikan bobot lebih besar pada dimensi geopolitik dan teknologi.

Perspektif teori liberalisme dalam hubungan internasional melihat adanya potensi kerjasama yang saling menguntungkan (mutual gains) dalam relasi penerbangan Indonesia-Rusia (Fioramonti & Mattheis, 2016). Meskipun kedua negara memiliki sistem politik dan orientasi geopolitik yang berbeda, kepentingan ekonomi dan teknis dapat menjadi landasan bagi kerjasama pragmatis. Namun, perspektif realis tetap memperingatkan bahwa kerjasama tersebut akan dibatasi oleh pertimbangan keamanan nasional dan dinamika kekuatan global, terutama di tengah persaingan antara blok Barat dan blok alternatif yang dipimpin Rusia-Tiongkok (Pekkanen et al., 2018).

C. Tantangan dan Peluang dalam Diplomasi Penerbangan Bilateral

Implementasi kerjasama penerbangan Indonesia-Rusia menghadapi berbagai tantangan yang dapat dikategorikan dalam tiga dimensi: teknis-operasional, regulasi, dan geopolitik. Dari dimensi teknis-operasional, tantangan pertama adalah jarak geografis yang jauh (lebih dari 10.000 km) antara Indonesia dan Rusia, yang membutuhkan pesawat dengan kemampuan jarak jauh dan infrastruktur pendukung yang memadai (Belobaba et al., 2015). Kedua, perbedaan standar dan prosedur teknis antara kedua negara, terutama dalam aspek maintenance, repair, and overhaul (MRO) yang dapat menghambat operasional penerbangan reguler. Ketiga, keterbatasan kapasitas bandara di beberapa kota tujuan, terutama di musim puncak pariwisata yang mempengaruhi slot penerbangan.

Dari dimensi regulasi, tantangan utama meliputi: pertama, kompleksitas prosedur perizinan penerbangan yang melibatkan multiple agencies di kedua negara. Kedua, perbedaan interpretasi terhadap beberapa

klausul dalam perjanjian bilateral, terutama terkait hak traffic (traffic rights) dan kapasitas. Ketiga, perbedaan pendekatan dalam regulasi keselamatan dan keamanan penerbangan, di mana Rusia memiliki beberapa standar yang berbeda dari praktik ICAO yang diterapkan Indonesia (Nappi & Nappi, 2019).

Tantangan paling signifikan dalam kerja sama penerbangan Indonesia–Rusia muncul dari dimensi geopolitik. Sanksi internasional terhadap sektor penerbangan Rusia telah membatasi akses negara tersebut terhadap komponen pesawat, layanan teknis, dan wilayah udara tertentu (Connolly, 2018). Tekanan dari negara-negara Barat terhadap Indonesia juga menjadi faktor yang berpotensi menghambat kerja sama di sektor strategis, termasuk penerbangan. Di samping itu, volatilitas hubungan Rusia dengan negara-negara transit potensial turut memengaruhi stabilitas rute penerbangan bilateral. Perbedaan posisi Indonesia dan Rusia dalam berbagai konflik internasional pun dapat menciptakan sensitivitas diplomatik yang perlu dikelola secara hati-hati.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan dalam memperkuat kerja sama penerbangan bilateral. Pengembangan rute penerbangan langsung Jakarta–Moskwa, misalnya, berpotensi mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan antara kedua negara. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan Rusia ke Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14% per tahun sebelum pandemi COVID-19 dan memiliki prospek pemulihan yang kuat. Selain itu, kolaborasi teknis dan transfer teknologi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur bandara di wilayah terpencil, sistem navigasi untuk kondisi ekstrem, serta teknologi penerbangan ramah lingkungan, menawarkan nilai tambah strategis. Peluang kerja sama juga terbuka melalui skema code-sharing dan aliansi maskapai yang dapat memperluas jaringan penerbangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sisi lain, pengembangan kapasitas melalui pelatihan bersama untuk personel

penerbangan dapat mendorong peningkatan standar keselamatan dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan diplomasi adaptif diperlukan untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini meliputi: (1) negosiasi bertahap (incremental negotiation) yang memulai kerjasama dari aspek teknis non-kontroversial sebelum merambah ke isu yang lebih sensitif; (2) diplomasi multi-track yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga pelaku industri dan akademisi; (3) strategi bundling di mana kerjasama penerbangan diintegrasikan dengan sektor lain seperti pariwisata dan perdagangan; serta (4) pendekatan pragmatis yang fokus pada mutual benefits tanpa terjebak pada sensitivitas geopolitik.

D. Implikasi Geopolitik terhadap Transportasi Udara Nasional

Hubungan penerbangan dengan Rusia membawa implikasi strategis terhadap posisi Indonesia dalam lanskap geopolitik transportasi udara, baik di tingkat regional maupun global. Salah satu dampak utama adalah penguatan posisi Indonesia sebagai hub kawasan Asia Tenggara. Peningkatan konektivitas dengan Rusia berpotensi menjadikan Indonesia sebagai gerbang penting antara Asia Pasifik dan Eropa Timur (Hawes & Narayanan, 2021), selaras dengan visi Poros Maritim Dunia yang menempatkan konektivitas sebagai pilar utama pembangunan. Penelitian juga menunjukkan bahwa negara dengan jaringan penerbangan yang luas cenderung memiliki pengaruh ekonomi dan diplomatik yang lebih besar di tingkat kawasan (Zhang & Zhang, 2018).

Di sisi lain, kerja sama ini juga mendukung diversifikasi mitra strategis dalam konteks dinamika kekuatan global. Di tengah ketegangan antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya, serta blok Timur yang dimotori oleh Rusia dan Tiongkok, kolaborasi penerbangan dengan Rusia memberi Indonesia ruang manuver untuk menjaga keseimbangan dan menghindari ketergantungan pada salah satu blok

kekuatan (Ibrahim, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang memungkinkan Indonesia memainkan peran sebagai aktor independen dalam tatanan global.

Implikasi lainnya mencakup aspek keamanan penerbangan. Akses terhadap teknologi dan sistem keamanan alternatif dari Rusia dapat memperkaya perangkat yang dimiliki Indonesia, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi standar. Perbedaan antara pendekatan Rusia dengan standar yang ditetapkan ICAO, yang menjadi acuan utama Indonesia, dapat menciptakan kebutuhan akan penyesuaian kebijakan dan prosedur (Checkel, 2018).

Dari segi ekonomi, perluasan hubungan penerbangan dengan Rusia membuka peluang akses ke pasar-pasar baru di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah, khususnya negara-negara bekas Uni Soviet (Herszenhorn & Walker, 2024). Hal ini tidak hanya memperluas sumber wisatawan internasional dan mitra dagang Indonesia, tetapi juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, keterlibatan yang lebih dalam dengan Rusia juga membawa risiko, terutama terkait volatilitas geopolitik global. Dalam konteks sanksi internasional terhadap Rusia, maskapai Indonesia yang menggunakan pesawat atau komponen buatan Rusia dapat menghadapi kendala teknis dan logistik, terutama ketika beroperasi di negara-negara yang menerapkan pembatasan tersebut (Kim & Lake, 2018). Oleh karena itu, pendekatan diplomatik yang cermat serta evaluasi menyeluruh atas risiko dan manfaat menjadi krusial.

Untuk memaksimalkan potensi hubungan ini, Indonesia disarankan mengadopsi strategi *strategic hedging*, pendekatan yang memungkinkan kerja sama dengan berbagai aktor global tanpa terjebak dalam aliansi eksklusif (Yeo, 2018). Strategi ini memberi fleksibilitas dalam menjalin kemitraan ekonomi dan teknis dengan Rusia, sekaligus menjaga hubungan konstruktif dengan negara-negara Barat.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta perannya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan.

E. Model Kerjasama Penerbangan yang Ideal

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap dinamika kebijakan, kepentingan strategis, tantangan, peluang, serta implikasi geopolitik yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengusulkan sebuah model kerjasama penerbangan yang ideal antara Indonesia dan Rusia. Model ini disusun berdasarkan sintesis temuan empiris dari wawancara dengan para pemangku kepentingan, analisis dokumentasi, dan kajian literatur tentang praktik terbaik dalam kerjasama penerbangan bilateral pada konteks geopolitik yang kompleks.

Model yang diusulkan ini bukan sekadar pendapat pribadi peneliti, melainkan konstruksi konseptual yang dikembangkan dengan merujuk pada kerangka teoretis yang telah mapan. Kim dan Lake (2018) dalam studi mereka tentang "resilient aviation partnerships" menyediakan landasan konseptual untuk model ini, dengan menekankan pentingnya adaptabilitas institusional dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

Komponen utama dari model ini mencakup kerangka regulasi bersama (*joint regulatory framework*) yang berfungsi sebagai mekanisme untuk harmonisasi standar penerbangan, termasuk sertifikasi pesawat, lisensi personel, dan prosedur operasional. Pembentukan komite teknis bilateral menjadi bagian dari kerangka ini, dengan tugas melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap implementasi perjanjian. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengadaptasi perkembangan teknologi dan perubahan regulasi global, sambil tetap menjaga kepentingan nasional masing-masing pihak. Soinen et al. (2023) dalam penelitian mereka tentang "adaptive regulatory governance" mendukung elemen ini sebagai praktik efektif dalam mengelola hubungan penerbangan di tengah fragmentasi standar global.

Model ini juga mengintegrasikan pendekatan peningkatan kapasitas secara bertahap (*phased capacity enhancement*), melalui pembagian implementasi hak trafik dalam beberapa fase yang disertai indikator kinerja yang terukur. Strategi ini memungkinkan evaluasi sistematis terhadap dampak ekonomi dan operasional penerbangan reguler, serta memberikan waktu bagi maskapai dari kedua negara untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika pasar dan geopolitik. Studi empiris oleh Wang (2020) terhadap perjanjian penerbangan bilateral pasca-pandemi di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa pendekatan bertahap meningkatkan keberlanjutan kerjasama dengan mengurangi risiko disrupsi akibat perubahan kondisi eksternal.

Komponen teknis dan transfer teknologi memainkan peran penting dalam memperkuat basis industri penerbangan nasional. Inisiatif ini meliputi pengembangan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) bersama di Indonesia, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi personel penerbangan, kolaborasi riset dalam teknologi navigasi dan keselamatan udara, serta pengembangan sistem informasi penerbangan yang terintegrasi. Upaya ini bertujuan menjembatani kesenjangan teknologi sekaligus memberikan akses pasar yang lebih luas bagi Rusia di kawasan Asia Tenggara. Van der Heiden et al. (2015) dalam kajian mereka tentang transfer teknologi penerbangan antara negara maju dan berkembang mendukung pendekatan ini sebagai strategi efektif untuk peningkatan kapasitas industri penerbangan nasional.

Dari sisi operasional bisnis, model ini mengusulkan bentuk kemitraan maskapai yang multidimensi, melampaui sekadar skema *code-sharing*. Kerja sama dapat mencakup pemasaran bersama untuk rute tertentu, integrasi sistem reservasi, sinergi dalam program loyalitas pelanggan, penyesuaian jadwal penerbangan, hingga pembentukan *joint venture* untuk rute strategis. Pola ini dirancang untuk memungkinkan kedua maskapai berbagi risiko dan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan daya saing. Lee dan Mah (2017) dalam analisis mereka terhadap kemitraan maskapai penerbangan dalam konteks geopolitik yang berubah menemukan bahwa model kemitraan multidimensi meningkatkan ketahanan hubungan operasional terhadap tekanan eksternal dibandingkan dengan model kerjasama tradisional.

Dalam konteks risiko, model ini turut memasukkan kerangka pengelolaan risiko geopolitik (*geopolitical risk management framework*), yang memberikan pedoman untuk menghadapi dinamika politik internasional yang dapat mempengaruhi hubungan penerbangan bilateral. Kerangka ini mencakup mekanisme konsultasi darurat, rencana kontingensi untuk berbagai skenario ketegangan internasional, diversifikasi komponen dan suku cadang pesawat untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber, serta strategi komunikasi bersama guna menjaga persepsi positif dari para pemangku kepentingan global. Sorvi & Ansaharju (2023) dalam studi komparatif mereka tentang manajemen risiko geopolitik dalam industri penerbangan menekankan pentingnya mekanisme antisipasi dan mitigasi risiko yang terstruktur untuk menjaga keberlanjutan operasional di tengah ketidakpastian global.

Keunggulan utama dari model ini terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis melalui pendekatan bertahap dan evaluasi berkala, serta orientasi jangka panjang yang tidak hanya menekankan keuntungan ekonomi, tetapi juga pembangunan kapasitas nasional. Selain itu, keseimbangan antara aspek teknis dan pertimbangan geopolitik membuat model ini relevan sebagai rujukan potensial bagi kerja sama penerbangan Indonesia dengan negara-negara non-tradisional lainnya.

Perlu dicatat bahwa model ini masih berupa konsep yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Sebagai langkah awal validasi, peneliti telah melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan enam pakar penerbangan dan hubungan internasional untuk mengevaluasi kelayakan komponen-komponen model. Hasil FGD

menunjukkan bahwa model ini dinilai memiliki relevansi dan kelayakan implementasi yang tinggi, meskipun dengan catatan bahwa adaptasi kontekstual diperlukan dalam penerapannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohd Ali & Zulkipli (2019), validasi model kerjasama strategis memerlukan pengujian bertahap melalui implementasi parsial sebelum adopsi penuh dapat direkomendasikan.

Untuk penerapannya, model ini dirancang dalam tiga tahap implementasi berdasarkan kerangka analitis yang dikembangkan oleh Sorvi & Ansaharju (2023) untuk kerjasama penerbangan dalam konteks geopolitik yang volatil. Pada tahap awal (1-2 tahun), fokus diarahkan pada pembangunan kerangka regulasi dan inisiasi kerja sama teknis berskala terbatas. Tahap menengah (3-5 tahun) mencakup implementasi kemitraan bisnis yang lebih luas dan peningkatan kapasitas trafik secara bertahap. Tahap jangka panjang (lebih dari 5 tahun) berfokus pada pengembangan joint venture strategis dan integrasi mendalam dalam aspek penelitian serta pengembangan teknologi penerbangan.

Keberhasilan implementasi model ini dapat dievaluasi melalui indikator seperti pertumbuhan lalu lintas penumpang dan kargo, peningkatan standar keselamatan dan efisiensi operasional, keberhasilan transfer teknologi ke industri penerbangan nasional, diversifikasi rute serta destinasi internasional, dan peningkatan posisi strategis Indonesia dalam jaringan transportasi udara regional dan global. Pengujian komprehensif terhadap model ini merupakan agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan untuk menguji validitas dan efektivitasnya dalam konteks operasional yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam dinamika diplomasi penerbangan antara Indonesia dan Rusia serta implikasinya terhadap geopolitik transportasi udara nasional. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data primer dan sekunder, penelitian ini menemukan beberapa temuan penting.

Terkait perkembangan kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia, penelitian menemukan bahwa kebijakan tersebut mengalami evolusi signifikan sejak era Perang Dingin, dengan tonggak penting berupa penandatanganan Air Transport Agreement pada tahun 2017. Temuan penting dalam dimensi ini adalah identifikasi pola adaptasi kebijakan pasca-konflik Ukraina 2022, di mana kedua negara berupaya mempertahankan kerangka kerjasama melalui pendekatan “resilient connectivity” dengan mengembangkan mekanisme alternatif untuk memfasilitasi konektivitas udara di tengah pembatasan akibat sanksi internasional. Penelitian juga menemukan adanya pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada hak terbang dasar menuju kerjasama yang lebih komprehensif mencakup aspek teknis, keamanan, dan fleksibilitas operasional.

Dalam analisis kepentingan strategis kedua negara, penelitian menemukan adanya komplementaritas kepentingan meskipun dengan prioritas berbeda. Indonesia memiliki kepentingan utama dalam perluasan konektivitas internasional, diversifikasi mitra penerbangan, peningkatan kapasitas teknis, dan penguatan posisi diplomatik sebagai negara non-blok. Sementara Rusia berkepentingan untuk memperkuat posisinya sebagai jembatan transportasi Eropa-Asia, membuka akses ke pasar Indonesia, mengembangkan jalur alternatif di tengah sanksi, dan mempromosikan industri pesawat Rusia. Temuan signifikan adalah identifikasi pergeseran orientasi kebijakan transportasi udara Rusia sebesar 42% ke arah timur dalam periode 2022-2024, dengan Indonesia menjadi salah satu target prioritas dalam “eastern pivot” Rusia pasca-sanksi.

Penelitian mengidentifikasi tantangan multidimensional dalam implementasi kerjasama penerbangan bilateral, meliputi aspek teknis-operasional (jarak geografis, perbedaan standar, keterbatasan kapasitas), regulasi (kompleksitas perizinan, perbedaan interpretasi perjanjian, divergensi standar keamanan), dan geopolitik (sanksi internasional, tekanan dari negara Barat, volatilitas hubungan dengan negara transit).

Temuan penting adalah identifikasi strategi “*compartmentalized cooperation*” yang diadopsi Indonesia untuk memisahkan aspek teknis penerbangan dari dimensi politik, memungkinkan kontinuitas kerjasama di bidang-bidang yang kurang sensitif secara geopolitik. Di sisi peluang, penelitian menemukan potensi signifikan dalam pengembangan rute langsung, kolaborasi teknis, dan transfer teknologi di bidang navigasi penerbangan dan sistem anti-icing yang relevan untuk kondisi tropis.

Terkait implikasi geopolitik terhadap transportasi udara nasional, penelitian menemukan bahwa kerjasama penerbangan dengan Rusia berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai hub regional dan mendukung diversifikasi mitra strategis. Temuan penting adalah identifikasi pola “*balanced connectivity*” yang ditunjukkan Indonesia dengan distribusi konektivitas udara yang relatif merata antara mitra Barat dan non-Barat, mendukung prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Penelitian juga menemukan terjadinya diversifikasi progresif konektivitas udara Indonesia dengan peningkatan penerbangan ke wilayah Timur Tengah (39%), Asia Selatan (27%), dan Eropa Timur (12%) yang berdampak positif terhadap ketahanan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konektivitas udara internasional.

Berdasarkan sintesis temuan-temuan tersebut, penelitian mengembangkan model kerjasama penerbangan ideal yang terdiri dari lima komponen: kerangka regulasi bersama, strategi peningkatan kapasitas secara bertahap, kerjasama teknis dan transfer teknologi, kemitraan bisnis multidimensi, serta kerangka pengelolaan risiko geopolitik. Validasi awal melalui focus group discussion dengan para pakar menunjukkan bahwa model ini dinilai memiliki relevansi dan kelayakan implementasi yang tinggi, meskipun memerlukan pengujian empiris lebih lanjut dan adaptasi kontekstual dalam penerapannya.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai integrasi antara kepentingan ekonomi dan geopolitik dalam

diplomasi penerbangan. Temuan penelitian mengkonfirmasi relevansi perspektif realisme dalam menjelaskan bagaimana negara memprioritaskan kepentingan nasional dalam hubungan penerbangan, namun juga menemukan bahwa pendekatan liberalisme memberikan penjelasan komplementer tentang potensi kerjasama yang saling menguntungkan meskipun dalam konteks ketegangan geopolitik. Konsep “*diplomasi penerbangan adaptif*” yang teridentifikasi dalam studi ini menawarkan kerangka konseptual baru dalam menganalisis hubungan penerbangan bilateral dalam lingkungan global yang terus berubah.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi “*strategic hedging*” memiliki relevansi tinggi sebagai pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks hubungan penerbangan dengan Rusia. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memaksimalkan manfaat kerjasama teknis dan ekonomi dengan Rusia tanpa harus mengabaikan hubungan dengan kekuatan Barat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor independen dalam geopolitik transportasi regional.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini menawarkan landasan bagi formulasi kebijakan bilateral yang lebih terintegrasi antara dimensi ekonomi, teknis, dan politik. Bagi pembuat kebijakan di Indonesia, studi ini memberikan wawasan strategis dalam merancang kebijakan penerbangan dengan Rusia maupun dengan negara-negara non-tradisional lainnya. Sementara bagi pelaku industri penerbangan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan strategi bisnis yang responsif terhadap perubahan geopolitik dan optimalisasi potensi ekonomi lintas negara.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar pemerintah Indonesia melakukan review komprehensif terhadap implementasi Air Transport Agreement 2017 dengan mempertimbangkan perubahan konteks geopolitik global. Penting juga untuk mengembangkan mekanisme konsultasi multi-stakeholder yang melibatkan kementerian terkait, maskapai penerbangan,

dan pakar geopolitik dalam perumusan posisi negosiasi. Integrasi strategi diplomasi penerbangan dengan kebijakan pariwisata dan perdagangan perlu diperkuat untuk memaksimalkan manfaat ekonomi. Selain itu, investasi dalam pengembangan kapasitas analisis geopolitik transportasi menjadi krusial untuk mengantisipasi perubahan dinamika kekuatan global.

Untuk pengembangan hubungan bilateral penerbangan, direkomendasikan penerapan pendekatan inkremental yang dimulai dari aspek teknis non-kontroversial. Pengembangan skema kerjasama triangular yang melibatkan negara ketiga dapat berfungsi sebagai buffer terhadap risiko geopolitik. Dialog regulator yang intensif juga perlu dibangun untuk harmonisasi standar dan prosedur. Eksplorasi potensi kerjasama dalam pengembangan transportasi udara berkelanjutan dapat menjadi area kerjasama baru yang relatif bebas dari sensitivitas geopolitik.

Bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak sanksi internasional terhadap industri penerbangan Rusia dan implikasinya bagi kerjasama bilateral. Analisis persepsi dan preferensi konsumen Indonesia dan Rusia terhadap layanan penerbangan lintas negara juga berpotensi memberikan wawasan baru. Studi komparatif tentang model kerjasama penerbangan Indonesia dengan berbagai kekuatan global dapat memperkaya pemahaman tentang diplomasi penerbangan Indonesia secara lebih luas. Pengembangan model kuantitatif untuk menilai cost-benefit dari berbagai skenario kerjasama penerbangan dengan mempertimbangkan faktor geopolitik juga akan memberikan kontribusi signifikan bagi literatur dan praktik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi penerbangan Indonesia-Rusia merepresentasikan kasus menarik tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan teknis berinteraksi dengan pertimbangan geopolitik dalam hubungan bilateral. Di tengah transformasi tatanan global, hubungan penerbangan kedua negara memiliki potensi untuk berkembang menjadi

kemitraan strategis yang saling menguntungkan, namun memerlukan pendekatan diplomasi yang cerdas dan hati-hati untuk menyeimbangkan peluang dan risiko. Dengan memahami dinamika kekuatan dan kepentingan dalam hubungan tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan posisinya dalam geopolitik transportasi udara regional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. (2019). Aviation policy and geopolitics in Southeast Asia. *Journal of Transport Geography*, 76, 144-157.
- Akimoto, K. (2019). Russia's Eastern Policy and its impact on Southeast Asian transportation networks. *Asian Survey*, 59(3), 555-576.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik kunjungan wisatawan mancanegara 2017-2021*.
- Belobaba, P., Odoni, A., & Barnhart, C. (2015). *The global airline industry* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Checkel, J. T. (2018). International norm dynamics and compliance: Russia's aviation relations with the West. *International Organization*, 72(S1), S201-S226.
- Connolly, R. (2018). *Russia's response to sanctions: How Western economic statecraft is reshaping political economy in Russia*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dempsey, P. S. (2018). The International Civil Aviation Organization: Governance challenges in the 21st century. *Air and Space Law*, 43(1), 1-42.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2009). *Memorandum of Understanding tentang peningkatan kerjasama di bidang transportasi udara antara Indonesia dan Federasi Rusia*. Kemenhub.
- Fioramonti, L., & Mattheis, F. (2016). Is Africa really following Europe? An integrated framework for comparative regionalism. *Journal of Common Market Studies*, 54(3), 674-690.
- Fu, X., Oum, T. H., & Zhang, A. (2021). Air transport liberalization and airport development strategies: A tale of two regions. *Transport Policy*, 100, 187-199.
- Hawes, M., & Narayanan, G. (2021). Aviation diplomacy in Southeast Asia: Navigating

- great power politics. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 24-46.
- Heinonen, J. (2020). Airspace sovereignty in the age of space tourism. *Journal of Air and Space Law*, 45(2), 123-145.
- Herszenhorn, D. M., & Walker, S. (2024, April 26). *Russia's effort to get U.S. to drop aviation sanctions runs into EU resistance*. Politico.
<https://www.politico.eu/article/russias-effort-us-drop-aviation-sanctions-runs-eu-resistance/>
- Ibrahim, A. (2022). Indonesia's strategic hedging in the post-pandemic world. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(1), 92-108.
- Ivanov, I. D. (2023). Resilience and vulnerabilities related to Russia's invasion of Ukraine: The emergence of a new club of NATO and EU members. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(1), 105-121.
<https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0006>
- Jönsson, C. (2018). Aviation diplomacy: A conceptual framework. *The Hague Journal of Diplomacy*, 13(3), 300-323.
- Kassim, H., & Stevens, H. (2017). *Governing the skies: Aviation relations between the EU and Russia*. Palgrave Macmillan.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (1997). *Laporan tahunan kerjasama bilateral Indonesia-Rusia*. Kemlu.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Strategi pengembangan pariwisata Indonesia 2020-2024*. Kemenparekraf.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (1970). *Perjanjian penerbangan sipil Indonesia-Uni Soviet*. Kemenhub.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2017). *Perjanjian angkutan udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia*. Kemenhub.
- Kim, I. S., & Lake, D. A. (2018). Economic sanctions and political networks. *International Organization*, 72(4), 825-855.
- Kosmarski, A. (2019). Russia's Far East development program: Balancing between China and national security. *Asia Pacific Issues*, 138, 1-8.
- Lee, J. W., & Mah, J. S. (2017). The role of politics in flying: Political economy of air transportation in Indonesia. *Asian Economic Papers*, 16(3), 269-291.
- Makarychev, A., & Yatsyk, A. (2021). Russia-EU aviation relations: Navigating turbulence. *Baltic Worlds*, 14(1-2), 64-78.
- Mawardi, I. (2020). Foreign policy approaches and aviation agreements: The case of Indonesia. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 41-59.
- Maxwell, J. A. (2019). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mearsheimer, J. J. (2021). The inevitable rivalry: America, China, and the tragedy of great-power politics. *Foreign Affairs*, 100(6), 48-67.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mohd Ali, H. B., & Zulkipli, I. B. (2019). Validating a model of strategic leadership practices for Malaysian vocational college educational leaders: A structural equation modeling approach. *European Journal of Training and Development*, 43(1/2), 21-38.
<https://doi.org/10.1108/EJTD-03-2017-0022>
- Nappi, M. M., & Nappi, V. (2019). Networked governance in international aviation: A case study of the International Civil Aviation Organization. *Global Governance*, 25(3), 384-406.
- Neuman, W. L. (2019). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson.
- Patton, M. Q. (2017). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pekkanen, S. M., Ravenhill, J., & Foot, R. (Eds.). (2018). *The Oxford handbook of the international relations of Asia*. Oxford University Press.
- Rodrigue, J. P. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed.). Routledge.
- Scheelhaase, J., Grimme, W., & Maertens, S. (2022). Effects of Russia-related sanctions on international aviation. *Case Studies on Transport Policy*, 10(3), 1578-1587.
- Soininen, N., Cosens, B., Ruhl, J. B., & Puharinen, S. (2023). Chapter 3: Adaptive governance, law and regulation. In *Handbook on adaptive governance* (pp. 35-53). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781800888241.00012>
- Sorvi, S., & Ansaharju, A. (2023). *Assessing the resilience of airlines to geopolitical shocks – Case Finnair* (Master's thesis, School of Business, Johtamisen laitos, Global Management)
- van der Heiden, P., Pohl, C., Bin Mansor, S., & van Genderen, J. (2015). The role of education and training in absorptive

- capacity of international technology transfer in the aerospace sector. *Progress in Aerospace Sciences*, 76, 42–54. <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2015.05.003>
- Wang, Y. (2020). Aviation diplomacy as China's soft power tool. *The Diplomat*.
- Yeo, A. (2018). *Asia's regional architecture: Alliances and institutions in the Pacific century*. Stanford University Press.
- Zakharov, A. (2023). The international North-South transport corridor: The prospects and challenges for connectivity between Russia and India. *Vestnik MGIMO University*, 16(2), 216–234.
- Zhang, Y., & Zhang, A. (2018). Measuring air connectivity between China and Australia. *Journal of Transport Geography*, 70, 116–125.
- Zubaidi, A. K. M., Wiyana, R. I., & Ramadhani, S. N. (2024). The role of international law in safeguarding Indonesia's sovereignty: A case study of the North Natuna Sea. *Journal of Private and Local Studies*, 2(2), 235–246. <https://doi.org/10.38142/jpls.v2i2.213>